

## EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH SE KARESIDENAN PEKALONGAN TAHUN 2007-2011

Siti Fatimah Nurhayati<sup>1)</sup>, Ikhya Ulumudin<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email: haniffatimah@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
email: ikhya.ulum@yahoo.com

### *Abstract*

*Purpose of the research titled "Evaluation of Local Finance of Pekalongan residency of 2007-2011" is to analyze performance and capability of local finance of Pekalongan residency of 2007-2011. The research uses secondary data. Performance of local finance can be measured by using fiscal decentralization level, regional dependency level and regional independency level, whereas the mapping of local budget is measured by using local financial index and quadrant method. Result of the research indicated that Pekalongan Town, Batang regency, Pekalongan regency, Tegal regency and Brebes regency had very inadequate decentralization level, Tegal Town had inadequate fiscal decentralization. Seven regencies of Pekalongan residency had high dependency of level to central government. Tegal town belonged to adequate category had better independency level than other region. Further, Pekalongan town, Pemalang regency, Pekalongan regency were belonged to inadequate category, while Batang regency, Tegal regency and Brebes regency were grouped in very poor category. Pekalongan Town, Batang regency, Tegal town, Tegal regency and Pemalang regency had high index of local financial capability, whereas Brebes and Pekalongan regency had moderate index of local financial capability. Analysis of quadrant method concludes regions of Pekalongan regency were not found to belong to quadrant I. There were three regions (Pekalongan town, Batang regency and Pekalongan regency) belonged to quadrant II. One region (Tegal town) was found in quadrant III, and three regions (Pemalang regency, Tegal regency and Brebes regency) were found in quadrant IV.*

**Keywords :** *financial performance, financial capability index and financial capability map*

### 1. PENDAHULUAN

Menurut Mahmudi (2011), sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Penyelenggara sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Semua lapisan masyarakat sangat membutuhkan sektor publik, karena hanya sektor ini yang bisa menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan masyarakat. Barang publik tidak mungkin diselenggarakan oleh sektor bisnis karena

sektor bisnis hanya bergerak kepada kegiatan yang bersifat *profit oriented*.

Sejak era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi hak untuk melayani masyarakat dan mengatur administrasi keuangannya sendiri, baik terkait dengan pendapatannya maupun pengalokasian pengeluarannya agar dapat menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Pengelolaan itu dilakukan dengan cara membuat perencanaan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan anggaran yang ada agar supaya kinerja keuangan untuk pembangunan tepat sasaran, efisien dan efektif. Oleh karena pentingnya kinerja keuangan untuk pelayanan publik bagi suatu daerah, maka peneliti tertarik untuk meneliti kinerja

keuangan yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah se-Karesidenan Pekalongan Tahun 2007-2011.”

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan tahun 2007-2011; (2) Mengukur nilai indeks kemampuan keuangan (IKK) daerah se-Karesidenan Pekalongan dan menganalisis peta kemampuan keuangannya tahun 2007-2011

## 2. LANDASAN TEORI

### Pengertian Sektor Publik

Secara umum suatu organisasi dapat dikategorikan dalam tiga sektor, yaitu sektor bisnis, sektor publik dan sektor sosial. Organisasi sektor bisnis merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang komersial atau disebut juga dengan sektor privat atau swasta. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Sementara organisasi sektor sosial merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan tetapi diselenggarakan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok dan tidak dibawah organisasi pemerintahan. (Mahmudi, 2011).

Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan daerah. Pemerintah sebagai sektor publik bertanggungjawab melayani masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional secara efisien dan efektif dengan memperhatikan asas-asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif serta keseimbangan hak dan kewajiban (Anggraini dan Puranto, 2010).

### Prinsip Penganggaran Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber dana yang cukup bagi daerah, yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan. Pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah di atasnya yang diserahkan kepada daerah baik dari bagi hasil pajak maupun bukan pajak. Pinjaman hanya merupakan pelengkap atau pendapatan alternatif dari pendapatan-pendapatan yang lainnya (Suparmoko, 2003).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut jenisnya, belanja daerah mempunyai dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Misalnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sementara belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan (Suparmoko, 2013).

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah yaitu (Darise, 2007): (a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD; (c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan dalam APBD dilakukan melalui rekening kas daerah.

### **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Menurut teori *agency*, salah satu siklus terpenting dalam manajemen adalah bagaimana pertanggungjawaban dibuat oleh penerima mandat kepada sang pemberi mandat. Dalam pengelolaan APBD, aspek pertanggungjawaban pengelolaan APBD memiliki makna strategis baik dari segi ekonomi, pengukuran kinerja, dan perencanaan strategis. Melalui proses pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan, akan diketahui permasalahan yang diketahui oleh pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya. Sebagaimana amanat undang-undang no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan harus disusun berdasarkan hasil yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern yang sehat dan selaras dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas. Oleh karena itu untuk dapat menilai keberhasilan pemerintah daerah maka pemerintah daerah harus melaporkan atau menyediakan informasi tentang pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana serta arus kas pemerintah daerah yang diwujudkan dalam beberapa juknis laporan (Anggraini dan Puranto, 2010).

### **Penelitian Terdahulu**

Paidi Hidayat dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten atau Kota Pemekaran Di Sumatera Utara” dengan menggunakan alat analisis pertumbuhan PAD (*share*), peranan PAD (*growth*) dan peta kemampuan berdasarkan metode kuadran,

memberikan kesimpulan bahwa dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang Hasundatan, dan Pakpak Bharat secara nyata mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pertumbuhan penerimaannya. Sedangkan dari sisi indikator kinerja PAD, kabupaten atau kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan (*growt*) PAD yang positif tetapi relatif masih kecil peranannya (*Share*) dalam struktur APBD. Peta kemampuan keuangan mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten atau kota pemekaran di Sumatera Utara dan masing kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007”, dengan alat analisis rasio kinerja keuangan diperoleh hasil bahwa kinerja keunagan daerah tidak optimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Sumbangan pendapatan asli daerah (*Share*) terhadap total pendapatan masih rendah dan pertumbuhan pendaptan asli daerah (*growth*) tinggi akan tetapi jika dibanding dengan proporsi belanja pertumbuhan proporsi PAD sangat kecil.

Mohammad Rofiuddin (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Dalam Era Otonomi Daerah Tahun 2005-2009”, dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan, memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi di seluruh kota/kabupaten di Pulau madura masih dikategorikan rendah sekali, disertai ketergantungan yang tinggi dan tingkat kemandirian yang rendah.

Fitria Luspitasari (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “Mapping Kinerja PAD, Efektivitas Penerimaan Daerah Sendiri dan Kemampuan Keuangan Serta Hubungannya Dengan Pertumbuhan Daerah” objek penelitiannya di Kabupaten atau kota se-Sumatera Barat, dengan menggunakan analisis kuadran hasilnya menunjukkan bahwa

peta kinerja pendapatan asli daerah pada tahun 2006, hanya ada dua daerah saja yang masuk dalam kuadran I yaitu kota Bukittinggi dan kota Solok, tiga daerah di kuadran III dan empat daerah di kuadran IV. Sementara di tahun 2007 tidak ada satupun daerah yang berada di kuadran I. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah jika dilihat dari sisi PAD. Kedua, secara empiris menunjukkan bahwa tingkat efektifitas PDS dengan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negative. Artinya sekalipun daerah mampu mencapai realisasi targetnya hingga tahap yang sangat efektif tidak akan memberikan dampak sama sekali pada pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan tahun 2007-2011. Daerah yang dijadikan objek penelitian adalah daerah se-Karesidenan Pekalongan yang terbagi menjadi tujuh kabupaten dan kota yaitu kota Pekalongan, kota Tegal, kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes. Ketujuh daerah tersebut dilewati jalur pantura yang diharapkan secara langsung berdampak positif terhadap kegiatan ekonominya.

#### Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*: tahun 2007-2011) yang meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan transfer, biaya perolehan pendapatan, target pendapatan, dan PDRB tahun 2007-2011 di daerah se-Karesidenan Pekalongan. Data ini diperoleh melalui studi pustaka dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait lainnya di masing-masing daerah yang bersangkutan.

#### Definisi Operasional Variabel

Beberapa variabel yang perlu diketahui definisinya di sini adalah :

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### b. Total Pendapatan Daerah (TPD)

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

#### c. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah di atasnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan transfer terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

#### d. Biaya Perolehan Pendapatan

Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mendapatkan pendapatan asli daerah sendiri.

#### Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif. Analisis kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu:

#### a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah sendiri terhadap total pendapatan daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai berikut :

$$DD = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DD = derajat desentralisasi

PAD = pendapatan asli daerah

TPD = total pendapatan daerah

Tabel 1. Kriteria Derajat Desentralisasi

Interval	Tingkat Derajat Desentralisasi
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Wulandari, 2001:2

#### b. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana ekstern atau dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam membiayai jalannya pemerintahan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan.

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Interval	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri –Fisipol UGM, 2001

#### a. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Tingkat kemandirian dapat dirumsukan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Interval	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri –Fisipol UGM, 2001

Pemetaan kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan indeks kemampuan keuangan (IKK) dan metode kuadran. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata dari rata-rata indeks *growth*, *share*, dan elastisitas. Oleh karena itu, menentukan indeks IKK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Bappenas, 2003):

#### a. Menghitung rata-rata indeks *growth*

*Growth* merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam mendapatkan PAD dari periode ke periode.

Rumus dalam mencari *growth* sebagai berikut :

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan asli daerah sendiri tahun i  
 PAD<sub>i-1</sub> = Pendapatan asli daerah sendiri tahun i-1

Setelah nilai *growth* diperoleh maka dicari nilai *growth* terendah (minimum) dan nilai *growth* tertinggi (maksimum). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai indeks *growth*. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata indeks *growth* yang ada.

#### a. Menghitung rata-rata indeks *Share*

*Share* merupakan ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan belanja pembangunan daerah. Ukuran ini dihitung dari rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah.

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belaja} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan asli daerah

Setelah nilai *share* diperoleh maka dicari nilai *share* terendah (minimum) dan nilai *share* tertinggi (maksimum). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai indeks *share*. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata indeks *share* yang ada.

a. Menghitung rata-rata indeks Elastisitas

Elastisitas adalah ukuran yang menggambarkan sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi. Rumus dalam mencari elastisitas sebagai berikut :

$$Elastisitas = \frac{Growth}{Pertumbuhan\ Ekonomi} \times 100\%$$

Setelah nilai elastisitas diperoleh maka dicari nilai elastisitas terendah (minimum) dan nilai elastisitas tertinggi (maksimum). Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan nilai indeks elastisitas. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata indeks elastisitas yang ada.

b. Hitung rata-rata dari rata-rata indeks growth, indeks share dan indeks elastisitas sehingga diperoleh nilai IKK.

Tabel 4. Kriteria Indeks Kemampuan Keuangan

Interval	Klasifikasi Kemampuan Keuangan
0,00-0,33	Rendah
0,34-0,43	Sedang
0,44-1,00	Tinggi

Sumber : Bappenas, 2003

Alat analisis lainnya yang digunakan untuk pemetaan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah metode kuadran. Metode kuadran merupakan salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan kuadran dimana sumbu horizontal merupakan besarnya nilai rata-rata growth dan sumbu vertikal merupakan nilai rata-rata share. Dengan demikian dalam metode kuadran ini terbagi menjadi empat wilayah, dimana wilayah satu merupakan wilayah yang nilai rata-rata growth dan nilai rata-rata share nya tinggi, wilayah dua nilai rata-rata growth tinggi namun nilai rata-rata share nya rendah, wilayah tiga nilai rata-rata growth rendah tetapi nilai rata-rata share nya tinggi, dan yang terakhir wilayah empat yaitu wilayah yang nilai rata-rata growth maupun rata-rata share rendah (lihat gambar-2).

Gambar 2. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Kuadran

Rata-rata Share (%)	Kuadran II Share : Rendah Growth : Tinggi	Kuadran I Share : Tinggi Growth : Tinggi
	Kuadran IV Share : Rendah Growth : Rendah	Kuadran III Share : Tinggi Growth : Rendah
	Rata-rata growth (%)	

Sumber : Bappenas, 2003.

Secara detail, peta kemampuan keuangan daerah dapat dijelaskan seperti pada table 5.

Tabel 5. Klasifikasi status kemampuan keuangan daerah

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi ini paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal. Akan tetapi daerah punya kemampuan lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD (nilai <i>share</i> ) rendah namun pertumbuhan PAD (nilai <i>growth</i> ) tinggi
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD ( <i>growth</i> ) rendah. Sumbangan PAD terhadap APBD ( <i>share</i> ) tinggi namun pertumbuhannya ( <i>growth</i> ) rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran besar terhadap APBD dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD nya pun rendah.

Sumber : Bappenas, 2003.

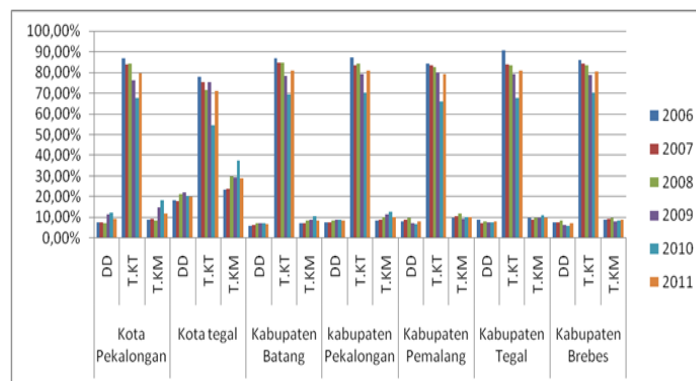
**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil analisis kinerja keuangan Daerah**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kota Pekalongan, kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes memiliki tingkat desentralisasi sangat kurang, kota Tegal memiliki tingkat derajat desentralisasi fiskal kurang. Tingkat ketergantungan keuangan ke tujuh daerah se-Karesidenan Pekalongan terhadap pemerintah masih tergolong sangat tinggi. Tingkat kemandirian keuangan kota Tegal

lebih baik dari daerah lainnya dengan kategori cukup, kemudian kota Pekalongan, kabupaten Pekalongan dan kabupaten Pemalang dengan kategori kurang, sementara kabupaten Batang, kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes masuk dalam kategori sangat kurang.

Untuk mempermudah melihat pergerakan derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan dan tingkat kemandirian di daerah se-Karesidenan Pekalongan dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Pergerakan Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Ketergantungan, dan Tingkat Kemandirian Daerah Se-Karesidenan Pekalongan





**Hasil Analisis Pemetaan Keuangan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Metode Kuadran.**

a. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)  
 Indeks kinerja keuangan daerah se-Karesidenan Pekalongan tertinggi adalah kabupaten Pemalang sebesar 0.5668, kabupaten Tegal sebesar 0.540463, kota Tegal sebesar 0.528581, kabupaten Batang sebesar 0.519676, kota Pekalongan sebesar 0.448629, kabupaten Brebes sebesar 0.434229, dan kabupaten Pekalongan sebesar 0.398192. Berdasarkan kriteria indeks kemampuan keuangan, daerah se-Karesidenan Pekalongan yang memiliki

kemampuan keuangan daerah yang tinggi ada lima daerah yaitu kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, kota Tegal, kabupaten Batang, dan kota Pekalongan, sedangkan daerah lainnya yaitu kabupaten Brebes dan kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan keuangan daerah sedang

b. Pemetaan Keuangan Metode Kuadran  
 Berdasarkan hasil dari analisis indeks *share* dan indeks *growth* tahun 2007-2011, diketahui bahwa nilai persentase rata-rata indeks *share* dan *growth* daerah se-Karesidenan Pekalongan dan juga daerah se-Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel-6.

Tabel-6. Rata-rata persentase *growth*, dan *share* Se-Karesidenan Pekalongan Tahun 2007-2011

Daerah	Rata-rata	Rata-rata
	Growth	Share
Kota Pekalongan	131.60%	10.02%
Kota Tegal	113.45%	19.79%
Kabupaten Batang	114.85%	6.89%
Kabupaten Pekalongan	121.92%	8.52%
Kabupaten Pemalang	106.94%	8.20%
Kabupaten Tegal	111.66%	7.97%
Kabupaten Brebes	111.29%	7.22%
Rata-rata Se-Propinsi Jateng	114.50%	10.26%

Sumber : data sekunder yang diolah

Dari tabel-6 diketahui posisi dari masing-masing daerah menggunakan metode kuadran dengan titik tengah rata-rata daerah

se provinsi. Kuadran dapat dilihat dalam gambar-2.

Gambar 2. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Kuadran (Titik Tengah Rata-Rata Se-Propinsi)

Rata-rata Share (%)	Kuadran II Share : Rendah Growth : Tinggi (Kota Pekalongan, kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan)	Kuadran I Share : Tinggi Growth : Tinggi
	Kuadran IV Share : Rendah Growth : Rendah (kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, dan kabupaten Brebes)	Kuadran III Share : Tinggi Growth : Rendah (Kota Tegal)
Rata-rata growth (%)		

Sumber : Bappenas, 2003.



Keterangan gambar :

Kuadran I : kemampuan *share* tinggi atau peran PAD berperan besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal karena *growth* nya tinggi.

Kuadran II : kemampuan *share* rendah namun *growth* nya tinggi artinya PAD di daerah tersebut belum mempunyai peran besar dalam APBD, sumbangan PAD masih rendah namun daerah ini mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD kedepannya berpeluang memiliki peran besar dalam APBD karena pertumbuhan PAD cukup tinggi.

Kuadran III : nilai *share* nya tinggi namun *growth* nya rendah artinya daerah memiliki PAD yang berperan besar dalam APBD, namun peran besar PAD tersebut memiliki peluang semakin mengecil karena pertumbuhan PAD kecil.

kuadran IV : nilai *share* dan *growth* nya rendah artinya PAD belum mempunyai peran yang besar dalam APBD dan daerah juga belum mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal.

Diantara ketujuh daerah se-Karesidenan Pekalongan tidak ada yang masuk dalam kuadran I, sedangkan di kuadran II adalah kota Pekalongan, kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, yang masuk dalam di kuadran III adalah kota Tegal, dan yang masuk dalam kuadran IV adalah kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, dan kabupaten Brebes.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis indeks kinerja keuangan (IKK) dan metode kuadran menyimpulkan bahwa:

1. Nilai Indeks kinerja keuangan daerah Se-Karesidenan Pekalongan menyimpulkan bahwa dari ketujuh daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi ada lima daerah yaitu kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, kota Tegal, kabupaten Batang, dan kota Pekalongan, sedangkan daerah lainnya yaitu kabupaten Brebes dan kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan sedang

2. Analisis metode kuadran menyimpulkan bahwa daerah se-Karesidenan

Pekalongan tidak ada yang masuk dalam kuadran I. Ada tiga daerah (kota Pekalongan, kabupaten Batang dan kabupaten Pekalongan) masuk dalam kuadran II. Satu daerah (kota Tegal) masuk dalam kuadran III dan tiga daerah (kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes) masuk dalam kuadran IV.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Se-Karesidenan Pekalongan

a. Guna meningkatkan derajat desentralisasi daerah maka perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat menaikkan PAD dengan cara pengoptimalan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sesuai dengan potensi masing-masing, serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

b. Peningkatan PAD juga dapat dilakukan melalui efisiensi pengeluaran atau belanja daerah agar tidak terjadi defisit.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademis semoga dengan penelitian ini dapat lebih meningkatkan ketertarikan mengenai analisa kinerja keuangan daerah karena keuangan daerah merupakan ujung tombak untuk menjalankan otonomi daerah.

## REFERENSI

- Anggraini, Y. dan Puranta, B. H. 2001. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BAPPENAS.2003. *Peta Kemampuan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bisma I Dewa Gde.Susanto Hery.2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun anggaran 2003-2007*. *Jurnal Ekonomi Ganec Swara*. Volume 4, Nomer 3 (Desember 2010) hal.75-86.

- Darise, Nurlan.2006.*Pengelolaan Keuangan Daerah*.Gorontalo:Indeks.
- Halim, A.2001.*Bunga Rampai Manajemen Keungan Daerah.Bunga Rampai Manajemen Keungan Daerah*.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hidayat Paidi dkk.2007.Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemerksaan Di Sumatera Utara.*Jurnal Ekonomi Pembangunan*.Volume 12 No.13 (Desember 2007) hal.213-222.
- Mahmudi.2011.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta:UII Press.
- Rinaldi Udin.2012.Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.*Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.Volume 8 Nomor 2 (Juni 2012) hal.105-113.
- Suparmoko.2001.*Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wulandari, A.2001.Kemampuan Keuangan Daerah: Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan otonomi Daerah.*Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.Volume 5, Nomor 2 (November 2001) hal.17-33.
- Yuwono, Sony dkk.2008.*Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*.Malang:Bayumedia Publishing.